

KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

- Puri Rahayu

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Kajian Yuridis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam hal ini mengenai kajian yuridis terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten jember tahun 2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang salah satu tugas yang dimiliki kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari

sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kata kunci : Pemerintah Daerah, APBD, Kepala Daerah, Peraturan Daerah, mengajukan.

Juridical STUDY ON BUDGET YEAR 2018 JEMBER DISTRICT BY LAW

NUMBER 23 OF 2014 ON LOCAL GOVERNMENT

- *Puri Rahayu*

ABSTRACT

This thesis discusses the Juridical Study on the Regional Budget Jember 2018 by Act No. 23 of 2014 on Regional Government, the purpose of this study to determine and assess the process of preparing Budget 2018 Jember regency using the approach of legislation (statue approach). Researchers used type of normative juridical research. In this case the assessment jurisdiction over income and expenditure budget the district of Jember in 2018 by Act No. 23 of 2014 on Regional Government which regulates about one of the tasks owned by the head of the region is preparing and submitting the draft Regional Regulation on APBD to DPRD to be discussed together as mentioned in Article 65 paragraph (1) letter d of Law Number 23 Year 2014, so that rights and obligations arising areas that can be valued in money that needs to be managed in a system of financial management. Financial management referred to a subsystem of the country's financial management system and an essential element in local governance,

Keywords : Local Government, Regional Budget, Regional Head, Regional Regulation, filed.